

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL

NOMOR : 12 /BPPI/BBT/Kep/01/2018

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR TEKSTIL TAHUN 2015-2019

KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 31.1/M-IND/Per/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 maka diperlukan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu penetapan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/06/2015 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2006, tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil Bandung;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 31.1/M-IND/Per/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;
15. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Nomor 353/BPPI/09/2017 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Tekstil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Kepala Balai Besar Tekstil Nomor 30/Kep/BPPI/BBT/01/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2015-2019
- Kedua : Menetapkan Revisi Rencana Strategis Balai Besar Tekstil sebagai acuan meningkatkan kinerja Balai Besar Tekstil hingga tahun 2019.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tahun 2019 dengan ketentuan akan diadakan perubahan-perubahan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 2 Januari 2018



Tembusan:

1. Pertinggal

IYP/PCB./SK R&Evisi Renstra 2015-2019

KATA PENGANTAR

Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, menyebabkan perlu dilakukan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Tekstil 2015-2019 seiring dengan penyempurnaan Renstra yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) 2015-2019. Peninjauan dan penyempurnaan Renstra BBT 2015-2019 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010), Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007), Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019 serta Renstra BPKIMI 2015-2019.

Revisi Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil analisis perubahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja BBT pada periode 2015-2019 yang diselaraskan dengan kebutuhan jasa pelayanan teknis bidang tekstil oleh industri TPT dan harapan stakeholder.

Revisi Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan kinerja BBT lima tahun kedepan, dalam rangka mewujudkan Visi **"Menjadi lembaga riset dan pelayanan jasa teknis yang unggul dan terpercaya di bidang tekstil"**.

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat di masa mendatang bagi kemajuan BBT, masyarakat industri TPT dan memenuhi harapan stakeholder.

Bandung, Januari 2018

PLT KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL,



Supomo

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	5
1. Potensi.....	5
2. Permasalahan.....	30
C. Maksud dan Tujuan	33
D. Pendekatan.....	34
 BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN	
A. Visi.....	35
B. Misi.....	35
C. Kondisi Yang Diharapkan Tahun 2005 – 2025.....	36
D. Kondisi Yang Diharapkan Tahun 2015 – 2019.....	37
E. Tujuan	37
 BAB III : ARAH KEBIJAKAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPKIMI	40
B. Arah Kebijakan dan Strategi BBT	42
 BAB IV : PENUTUP	49
 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sektor industri dituntut untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, karena sektor industri berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, sektor industri nasional dituntut untuk selalu terus menerus meningkatkan kemampuan berkompetisi dalam memproduksi dan memasarkan produk agar mampu menguasai pasar dalam negeri maupun menembus pasar ekspor.

Sejauh ini, peran sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan komponen utama pembangunan industri nasional, yang tidak saja mampu memberikan kontribusi output yang besar bagi perekonomian nasional, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012, kontribusi industri TPT (termasuk barang kulit dan alas kaki) terhadap PDB adalah sebesar 2,1%, dengan penyerapan tenaga kerja yaitu sekitar 1,5 juta orang.

Industri TPT merupakan salah satu industri tertua di Indonesia. Pertumbuhan yang pesat terutama didorong sejak diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968, kemudian dengan lahirnya kuota ekspor, maka TPT Indonesia terus berkembang.

Sementara itu, realisasi investasi pada tahun 2012 sektor TPT dari PMDN naik sebesar 345,45 persen dan PMA turun sebesar 65,19 persen dibandingkan pada tahun 2011. Investasi pada tahun 2012 yang berasal dari PMDN sebesar 4.450,9 milyar rupiah dan PMA sebesar US\$ 173,1 juta. Pertumbuhan ekspor Tekstil pada tahun 2012 bernilai US\$ 12.445,9 juta, atau turun sebesar 5,96 persen jika dibandingkan pada tahun 2011. Adapun penjualan produk TPT untuk kebutuhan dalam negeri tahun 2012 naik 3 persen dibandingkan tahun 2011, yaitu sebesar US\$ 7,6 milyar. Untuk penjualan ekspor produk TPT tahun 2012 menurun sebesar 5 persen jika dibandingkan tahun 2011, yaitu sebesar US\$ 12,6 milyar.

Dari uraian di atas mengenai peranan industri TPT nasional maupun peranannya di dalam dunia perdagangan internasional, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerja TPT nasional. Permasalahan tersebut di antaranya adalah:

Pertama, hambatan tarif dan non tarif. Terkait hambatan tarif, sejak diberlakukannya *Free Trade Agreement* (FTA) baik kerjasama bilateral, regional maupun global terjadi penurunan tarif bea masuk yang berlaku sama untuk semua negara, sehingga hambatan *tarif* tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai instrumen untuk perlindungan produk dalam negeri. Di sisi lain, negara-negara yang mengikuti FTA saat ini sudah siap menerapkan hambatan-hambatan *non tarif* seperti penerapan standar, Hak atas Kekayaan Intelektual, issue HAM, penerapan industri ramah lingkungan melalui penerapan *cleaner production/eco-efficiency, eco-friendly product* dan hambatan lainnya, ketika hambatan tarif tidak dapat diberlakukan lagi. Tanpa adanya hambatan non tarif, akses produk-produk dunia ke pasar kita akhirnya menjadi sangat mudah, sedangkan untuk produk nasional agar dapat memasuki pasar global, maka masalah hambatan non tarif harus diberdayakan. Industri TPT sangat berkaitan dengan hal tersebut terutama masalah lingkungan karena dampak dari proses produksi tekstil terutama *dyeing finishing* banyak menimbulkan pencemaran lingkungan dan di beberapa industri (hulu dan tengah) masih boros energi.

Kedua, utilisasi kapasitas terpasang dan terbatasnya kemampuan permesinan yang mendukung proses produksi. Data terakhir menunjukkan lebih dari 80 persen mesin TPT telah berusia lebih dari 20 tahun sehingga terjadi *in-efisiensi* dalam proses produksi. Di samping itu, teknologi yang digunakan membatasi keleluasaan industri dalam hal melakukan diversifikasi produk dan pencapaian kualitas yang diinginkan. Menyadari kondisi permesinan yang sudah tua ini, maka sejak tahun 2007 sampai saat ini (2014) Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program Restrukturisasi Permesinan yang memberi insentif berupa potongan harga bagi dunia usaha yang merestrukturisasi mesinnya. Sampai saat ini program tersebut mendapat sambutan positif, tercermin dengan tingginya jumlah pemohon yang mengajukan keringanan pembiayaan yang mencapai 231 perusahaan pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 dari 175 perusahaan yang mengajukan permohonan, hanya 134 perusahaan yang dapat

diproses, dengan nilai investasi mencapai 73,54 milyar rupiah. Pada tahun 2012 alokasi bantuan permesinan sebesar 1,75 triliun rupiah. Satu hal yang cukup menggembirakan dari program ini adalah, ternyata peremajaan mesin yang dilakukan telah mampu meningkatkan penghematan penggunaan energi sekitar 2-7 persen dan peningkatan produktivitas sebesar 4-9 persen yang merupakan bagian dari upaya menuju industri hijau.

Ketiga, ketergantungan bahan baku kapas yang mencapai 98 persen dari total kebutuhan bahan baku kapas nasional. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan tanpa henti, di antaranya adalah dengan menggali potensi *Sumber Daya Alam* nasional yang dapat menjadi bahan substitusi bahan baku tekstil, misalnya pengembangan serat rami/haramay, nanas, dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan bahan penolong tekstil seperti zat warna tekstil yang sebagian besar masih diimpor dari luar negeri. Sementara itu, rendahnya kualitas zat warna sintesis yang diimpor juga berdampak tidak ramah lingkungan karena mengandung limbah B3. Jika masih harus dilakukan pengolahan atas limbah tersebut maka akan membutuhkan investasi yang tidak kecil.

Keempat, kualitas produk TPT nasional yang relatif masih rendah. Secara teknis, rendahnya kualitas produk TPT antara lain disebabkan oleh faktor-faktor kerataan benang, kerapatan kain tenun, mudah luntur, mudah kusut, dan sebagainya. Disinilah diperlukan sentuhan litbang untuk peningkatan kualitas produk TPT nasional. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor industri prioritas yang menjadi andalan masa depan. Di tahun 2016, laju pertumbuhan industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka ditargetkan naik 6,33 persen dan memberi kontribusi sebesar 2,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Sektor Industri TPT akan terus menguat karena sifatnya yang padat karya dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di lapangan, industri pakaian menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan Tenaga kerja. Industri TPT saat ini menempati ranking 3 ekspor nasional dan menyerap tenaga kerja hingga 2,79 juta orang dengan hasil produksi yang mampu memenuhi 70 persen kebutuhan sandang dalam negeri. Sepanjang tahun 2015, sektor TPT telah memberikan kontribusi 1,22 persen terhadap PDB Nasional dan surplus ekspor sebesar USD4,31

miliar. Nilai ekspor TPT sendiri mencapai USD 12,28 miliar, atau berkontribusi sebesar 8,17 persen dari total nilai ekspor nasional. Industri TPT juga memiliki andil besar dalam menyumbang devisa negara. Total investasi di sektor tersebut pada 2015 mencapai Rp573 triliun, naik 16,9 persen dari 2014. Tercatat sektor TPT menyumbang 5,05 persen investasi PMA dan 3,07 persen investasi PMDN. Meski kinerja industri tekstil sempat menurun 4,79 persen pada tahun 2015 akibat krisis ekonomi global, peluang pertumbuhan tahun ini masih sangat besar. Ini dikarenakan Indonesia dapat merespons krisis global secara tepat dan sudah mulai menunjukkan perbaikan di sisi ekonomi nasional. Terlebih lagi, kelas menengah yang menjadi lokomotif konsumsi nasional menyumbang cukup banyak pertumbuhan ekonomi, Dengan kata lain, ketika pasar dunia tengah melemah, pasar domestik masih menjadi potensi besar.

Peningkatan nilai tambah produk tekstil menjadi lebih fungsional merupakan cara ampuh untuk menciptakan pasar dan meningkatkan nilai jual. Tujuannya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan industri padat karya.

Kelima, Isu mengenai kualitas dan menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu pertimbangan pembangunan Indonesia. Meningkatnya perhatian terhadap strategi pembangunan yang berorientasi lingkungan merupakan akibat dari memburuknya kondisi lingkungan. Hal ini merupakan hubungan sebab akibat pertumbuhan penduduk dan industrialisasi di Indonesia.

Dari uraian di atas, BBT terus berusaha mencari peran yang nyata dalam peningkatan daya saing industri TPT, dengan terus melaksanakan kegiatan yang nyata serta membunmi sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan, sehingga dengan nyata dapat memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

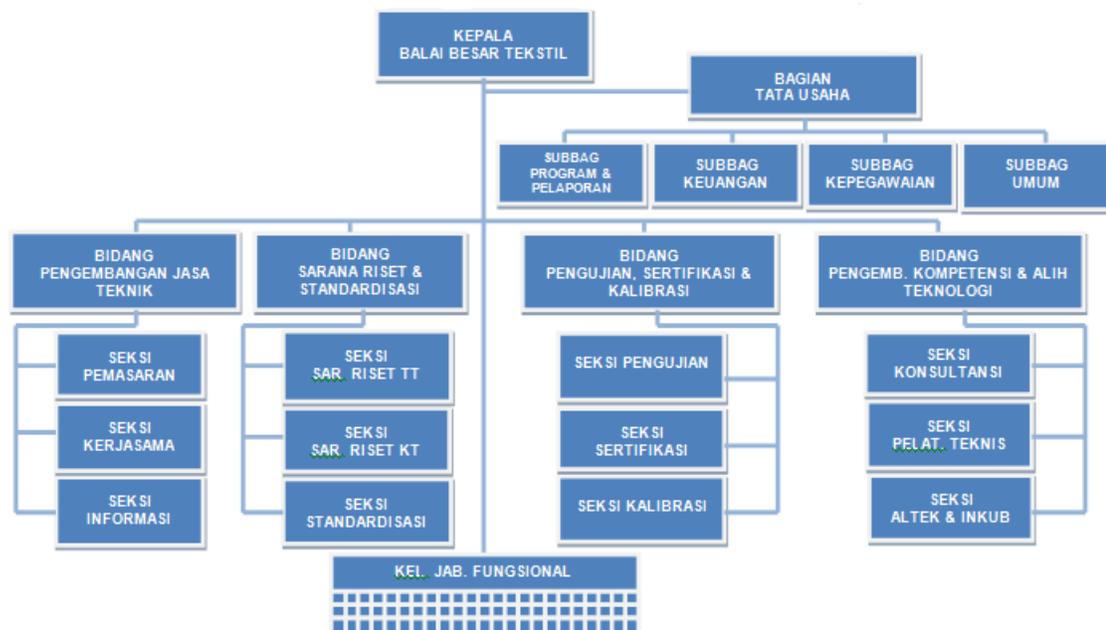
B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

a) Kelembagaan

Balai Besar Tekstil (BBT) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan memberikan pelayanan jasa teknis kepada industri. Lembaga ini berdiri untuk pertama kalinya pada zaman pendudukan Belanda tahun 1922 dengan nama *Textiel Inrichting Bandoeng*.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBT dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi lima bidang/bagian dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan Struktur Organisasi BBT sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2006 seperti pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri tekstil sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar Tekstil menyelenggarakan fungsi :

1. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.
2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri tekstil, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBT, serta penyusunan dan penerapan standarisasi industri tekstil.
5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBT.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Tekstil dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi enam bidang/bagian dan kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBT.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBT, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri tekstil dan produk tekstil.
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri tekstil, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi, alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemampuan kelembagaan sangat erat kaitannya dengan jasa pelayanan teknis BBT yang diberikan kepada pelanggan/industri. Jasa pelayanan teknis yang dilakukan terdiri dari 8 jasa layanan yaitu: Pengujian, Pelatihan Teknis, Rancang Bangun dan Perekayasaan Mesin/Alat, Kalibrasi, Konsultasi, Standardisasi, Sertifikasi, serta Teknologi proses/inkubasi.

b) Sumber Daya Manusia

Dalam operasionalnya BBT pada bulan Agustus tahun 2017 didukung oleh SDM sebanyak 109 orang. Berdasarkan golongan, latar belakang pendidikan, dan jabatan, pegawai tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan golongan, pegawai BBT dapat dikelompokkan sebagai berikut seperti tercantum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pengelompokan Pegawai BBT Tahun 2018
Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
Golongan IV	12
Golongan III	75
Golongan II	14
Golongan I	-
Jumlah	101

- 2) Berdasarkan jabatan, pegawai Balai Besar Tekstil dapat dikelompokkan seperti pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2. Pengelompokan Pegawai Balai Besar Tekstil Tahun 2018
Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Struktural	
a. Eselon II	0
b. Eselon III	5
c. Eselon IV	16
Fungsional	
a. Peneliti	13
b. Perekayasa	2
c. Litkayasa	7
d. Pustakawan	1
e. Pranata Humas	0
f. Penguji Mutu Barang (PMB)	4
Pelaksana	53

- 3) Berdasarkan pendidikan, pegawai Balai Besar Tekstil dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Pengelompokan Pegawai BBT Th. 2018 Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	2
S2	18
S1/D4	46
So/D3	3
SLTA	25
SLTP	3
SD	4
Jumlah	101

Dari jumlah tersebut, 29 pegawai akan memasuki usia pensiun pada tahun 2017 – 2019. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan 1.5 sebagai berikut.

Tabel 1.4. Rencana Pensiun Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	2017	2018	2019	Jumlah
S2 Teknik Tekstil				
S2 Kimia/Teknik Kimia		1	1	2
S2 Teknik Manajemen Industri				
S2 Teknik Metalurgi			1	1
S2 Administrasi				
S1/D4 Teknik Tekstil			2	2
S1/D4 Kimia Tekstil		2		2
S1 Administrasi				
S1 Ekonomi				
D3 Akuntansi			1	1

SLTA Umum		1	1	2
SMK Administrasi	2		2	4
SMK Teknik	3	1	4	8
SMK Tekstil/Kimia Tekstil			2	2
SLTP		2	1	3
SD	2	1	2	5
Jumlah	7	8	16	29

Tabel 1.5. Rencana Pensiun Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pendidikan	2017	2018	2019	Jumlah
Eselon II				0
Eselon III			1	1
Eselon IV			1	1
Peneliti		2		2
Perekayasa			1	1
Litkayasa	1	1	4	6
Pustakawan		1		1
Pelaksana	6	5	6	17
Jumlah	7	9	13	29

Berdasarkan data tersebut setiap tahun jumlah pegawai Balai Besar Tekstil berkurang dengan kompetensinya masing-masing. Oleh karena itu untuk mempertahankan kekuatan SDM Balai Besar Tekstil tersebut perlu dilakukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan kemampuan SDM yang ada melalui kegiatan magang, pelatihan dan pendidikan formal.

c) Sarana dan Prasarana

Secara umum BBT memiliki 5 laboratorium proses, 1 laboratorium pengujian, 1 laboratorium kalibrasi, dan 1 workshop rancang bangun dan perekayasaan industri (RBPI). Adapun 5 laboratorium proses yaitu; laboratorium pertenunan, laboratorium perajutan, laboratorium garmen, laboratorium teknologi kimia tekstil, dan laboratorium lingkungan.

1) Peralatan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

Penerimaan PNBPN BBT terbesar ada pada jasa layanan pengujian, sehingga sarana dan prasarana laboratorium terus diusahakan untuk terus diperbaharui sesuai tuntutan pelanggan maupun persyaratan standard uji atau produk. Adapun anggaran penambahan alat tersebut berasal dari DIPA BBT baik yang bersumber dari RM maupun PNP. Peralatan uji tersebut tersebar di Laboratorium Pengujian Tekstil, Laboratorium Kalibrasi, dan Laboratorium Pengujian Lingkungan. Peralatan uji selama lima tahun telah mengalami penambahan, seperti pada tahun 2009 telah ditambah dengan Universal Strength Tester, Lightfastness Tester dan hingga tahun 2014 peralatan uji terus bertambah melalui anggaran DIPA BBT ataupun bantuan dari Pustan dan KOICA. Dalam rangka mendukung kebijakan Kemenperin untuk pemberlakuan SNI wajib mainan anak, pada tahun 2011 dan 2012 diadakan pengadaan alat laboratorium uji untuk mainan anak dengan anggaran total hampir 10 milyar. Dengan penambahan peralatan uji tersebut kemampuan/ruang lingkup pengujian juga ikut meningkat, yang pada akhirnya akan menambah PNBPN dari layanan jasa tersebut.

2) Peralatan/mesin proses tersebar di beberapa laboratorium proses, secara umum ada di laboratorium teknik tekstil dan laboratorium kimia tekstil. Kondisi peralatan/mesin proses memang sudah tertinggal. Banyak peralatan/mesin yang usianya sudah diatas 20 tahun dan dalam kondisi rusak. Sehingga mulai tahun 2010 telah dilaksanakan kegiatan penghapusan beberapa peralatan dan mesin proses yang dinilai sudah

rusak atau tidak efektif dan efisien lagi, sementara yang masih baik dan berjalan tetap dipertahankan dan digunakan untuk kegiatan litbang. BBT memiliki beberapa mesin proses dengan teknologi baru yang sudah ada sejak tahun 2007 seperti Mesin Elektro Spinning, Wet Spinning, Mesin Rajut Bundar Dye Tester dan Mesin Spin Tester. Dalam rangka mendukung kegiatan PDDC, BBT telah mengadakan pengadaan mesin proses seperti mesin Jacquard elektronik dan mesin rajut seamless bundar yang anggarannya bersumber dari DIPA BBT tahun 2010.

- 3) Untuk mendukung tupoksi layanan jasa teknis yang diberikan oleh BBT, dan informasi layanan jasa dapat diakses secara mudah oleh pelanggan, BBT telah memiliki beberapa peralatan pendukung IT. Beberapa peralatan IT yang dimiliki adalah sebagai berikut: komputer desktop, laptop, printer, scanner, digital camera, LCD projector, video kamera, jaringan LAN untuk intranet dan internet serta peralatan lainnya. Pada tahun 2013 telah diadakan peralatan server untuk mengganti server yang lama, serta beberapa penambahan maupun penggantian komputer dan printer, terutama di seksi yang langsung berkaitan dengan layanan jasa teknik.
- 4) Peralatan perbengkelan yang dimiliki BBT terbilang lengkap, namun sebagian besar sudah tertinggal secara teknologi. Pada tahun 2007 peralatan perbengkelan telah ditambah dengan Mesin Bubut baru. Peralatan lain yang mendukung tupoksi adalah Genset UPS 16 KVA. Mesin genset ini diperlukan apabila terjadi pemadaman listrik PLN sehingga kegiatan di Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi tetap berlangsung.
- 5) Kendaraan operasional dan peralatan kantor sangat mendukung dalam melaksanakan kegiatan tupoksi, Jumlah kendaraan saat ini adalah dua belas kendaraan roda empat dan empat kendaraan roda dua. Secara bertahap sejak tahun 2012, bersumber dari anggaran DIPA BBT, telah diadakan pengadaan dua kendaraan operasional roda empat untuk menggantikan sebagian besar kendaraan operasional roda empat yang

telah berumur lebih dari 20 tahun. Pada tahun 2012 dilaksanakan kegiatan penghapusan dua kendaraan operasional roda empat, yang selanjutnya pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan pengadaan dua kendaraan roda empat, sebagai pengganti kendaraan tersebut.

d) *Product and Development and Design Center (PDDC)*

Di dalam menjalankan tupoksi litbang, BBT memiliki sebuah konsep melalui pencarian peran yang lebih baik dan benar agar BBT dapat berhasil menjadi kebanggaan baik di lingkungan Kementerian Perindustrian, masyarakat industri, maupun pada tataran nasional. Konsep ini selanjutnya dinamakan *Product Development and Design Center (PDDC)*. PDDC merupakan program *back to basic* dimana program kegiatannya lebih diarahkan kepada penguatan struktur/processing industri TPT, yang meliputi *fiber making, spinning, weaving, knitting, dyeing/printing/finishing*, dan *textile products*.

Pada awal tahun 2017 dilakukan penyempurnaan kompetensi inti Balai Besar Tekstil dari “Pengembangan Produk dan Desain Tekstil” menjadi “Pengembangan Tekstil Fungsional dan Green Textile”. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempertajam peran dan arah pengembangan Balai Besar Tekstil ke depan, sehingga PDDC pada akhirnya dapat menjadi wujud implementasi dari tupoksi dan kompetensi inti dimaksud.

Kegiatan *processing* sebagai kegiatan PDDC akan dilakukan sepanjang tahun (bukan insidental seperti yang selama ini dilakukan untuk kepentingan litbang), sehingga kegiatan PDDC harus dikelola secara professional. Dari kegiatan ini akan dihasilkan dua output penting, yaitu: (1) produk hasil proses, dan (2) inovasi. Kedua output ini pada hakekatnya merupakan *product development* dan *product design* yang tentunya sangat sejalan dengan tupoksi dan kompetensi inti Balai Besar Tekstil. Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan PDDC juga secara intens melibatkan para peneliti dan pejabat fungsional lainnya, maka yang tetap terjadi dari waktu ke waktu adalah perubahan itu sendiri.

Program PDDC akan melaksanakan enam kegiatan processing sebagai berikut:

1. Processing sutera dan campurannya,
2. Pengembangan produk dan desain tenun (*dobby* dan *jacquard*),
3. Pengembangan produk *knitting* (*warp, flat, circle*),
4. Pengembangan produk *non woven*,
5. Pengembangan *advance material* berbasis nanotech pada *dyeing/printing/finishing*, dan
6. Pengembangan produk dan desain garmen.

Produk hasil proses dari kegiatan PDDC selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu sarana promosi, khususnya ditujukan bagi IKM. Sedangkan inovasi yang dihasilkan baik berupa inovasi produk, proses maupun *entrepreneurship* dapat dikomersialisasikan kepada IKM maupun industri besar. Fungsi lain dari PDDC adalah sebagai sarana pelatihan *entrepreneurship* melalui simulasi bisnis yang dilengkapi dengan fasilitas mesin/peralatan nyata serta dapat pula dijadikan sebagai objek kunjungan studi/bisnis/wisata bagi masyarakat yang ingin mengetahui *processing* tekstil.

e) Jasa Pelayanan Teknis

Jasa pelayanan teknis (JPT) yang diberikan oleh BBT terdiri dari: Pengujian, Pelatihan Teknis, Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri, Kalibrasi, Konsultasi, Standardisasi dan Litbang, Sertifikasi, serta Teknologi proses/inkubasi.

Selama ini JPT telah menyumbang pendapatan sekitar rata-rata 17% dari total anggaran BBT. Pendapatan JPT BBT dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama delapan tahun terakhir (tahun 2009 s.d. 2017) tersaji pada Tabel 1.6 seperti berikut ini:

Tabel 1.6 Realisasi Penerimaan PNBP Jasa Pelayanan Teknis
Balai Besar Tekstil Tahun 2009 – 2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2009	3.814.000.000	3.163.659.385	83,0
2010	3.200.000.000	2.537.175.330	79,3
2011	3.350.000.000	2.637.020.120	78,7
2012	3.470.000.000	3.360.734.828	96,9
2013	3.470.000.000	2.957.813.180	85,2
2014	3.600.000.000	4.130.845.777	114,75
2015	5.190.000.000	5.479.450.632	110,27
2016	4.775.000.000	4.850.246.842	101,58
2017	5.000.000.000	4.476.240.750	89,52

Adapun kontribusi PNBP dari masing-masing jasa pelayanan teknis periode tahun anggaran 2009-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.7 sebagaimana tersaji berikut:

Tabel 1.7 Persentase Kontribusi Penerimaan PNBP Jasa Pelayanan Teknis
Balai Besar Tekstil Tahun 2009 – 2017

NO	JENIS PELAYANAN	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1.	Pengujian	60,10	60,70	67,90	70,60	70,40	70,84	64,85	64,46	62,59
2.	Pelatihan	23,50	20,00	7,60	6,60	4,90	4,69	2,11	2,16	2,95
3.	RBPI	0,80	0,60	0,00	0,10	0,80	0,00	0,00	0,26	0,05
4.	Kalibrasi	3,40	5,50	9,90	8,70	11,90	11,83	11,53	12,91	12,89
5.	Konsultasi	5,00	3,70	4,60	4,70	1,60	0,69	0,37	0,34	3,57
6.	Sertifikasi	1,70	1,90	4,60	5,10	3,70	7,92	19,60	18,09	17,57
7.	Litbang&Standar	1,10	2,40	1,20	1,90	2,00	0,70	0,00	0,00	0,00
8.	Tekn. Proses	4,40	5,20	4,20	2,30	4,70	3,34	1,50	1,66	0,27
9.	Wisata Tekstil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,19

Dari Tabel 1.7 terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir tiga besar persentase kontribusi penerimaan PNBP dari JPT didapat dari; pertama pengujian, kedua sertifikasi, ketiga kalibrasi. Sejak tahun 2009 penerimaan PNBP dari JPT kalibrasi menunjukkan kecenderungan meningkat, dan di tahun 2011 penerimaan PNBP dari JPT pelatihan menurun tetapi penerimaan PNBP dari JPT Sertifikasi cenderung meningkat dari tahun 2011. Kebijakan Kemenperin yang akan memberlakukan SNI wajib tekstil mendorong penerimaan PNBP Sertifikasi di tahun berikutnya, dan berdampak kepada kontribusi PNBP layanan jasa pelayanan pengujian tekstil dan lingkungan.

Untuk mendorong kegiatan layanan jasa teknis, BBT terus berusaha memberikan pelayanan prima serta kepuasan kepada pelanggan, hal ini dibuktikan dengan diimplementasikannya pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu untuk Laboratorium ISO 17025 bagi layanan jasa pengujian dan kalibrasi yang telah memperoleh sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 bagi layanan jasa pelatihan dan konsultasi, yang juga telah memperoleh sertifikasi dari SAI Global.

Keterbukaan terhadap lingkungan industri TPT yang sedang terjadi dan berkembang, baik nasional maupun internasional, merupakan syarat mutlak yang harus ditempuh oleh BBT untuk senantiasa meningkatkan pelayanan yang terbaik. Apabila peran sebagai penyedia layanan jasa dapat dilakukan dengan baik, maka keberadaan BBT dihadapan masyarakat industri akan tetap diperlukan. Untuk itu kesiapan sarana/prasarana, mesin/peralatan, dan kemampuan personil menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan peran ini.

1) Pengujian

JPT pengujian merupakan salah satu kegiatan jasa pelayanan teknis BBT yang menonjol dalam rangka memelihara konsistensi dan meningkatkan mutu produk yang dihasilkan oleh industri TPT sehingga

mampu menembus pasar ekspor. Sehubungan dengan hal itu, laboratorium pengujian tekstil memegang peranan penting dalam menilai dan mengukur produk TPT khususnya yang berkaitan dengan penerapan standar mutu produk dan sertifikasi produk. BBT telah memiliki laboratorium pengujian yang modern dan lengkap, serta berkompeten untuk menerbitkan sertifikat untuk produk TPT karena telah menerapkan sistem mutu ISO/IEC 17025 : 1999 atau SNI 19-17025 : 2000.

Sampai saat ini pesaing terdekat yang bergerak dalam bidang pengujian tekstil antara lain : PT. Sucofindo, Intertex, Balai Tekstil Jakarta, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil dan beberapa pesaing baru lainnya seperti PT Qualis. Beberapa pesaing secara insidental turut mengujikan sampelnya ke BBT sebagai data pembandingan maupun karena ketidaktersediaan alat uji di tempat tersebut.

Ditinjau dari peralatan uji tekstil yang tersedia di Balai Besar Tekstil dapat dikatakan relatif lengkap dan memadai sehingga ini merupakan kekuatan yang dimiliki BBT. Selain itu Lab. Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil telah memperoleh akreditasi dari National Association of Testing Authorities (NATA) Australia pada tahun 1994 dan pada tahun 2003 akreditasi dialihkan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) karena KAN telah mendapatkan saling pengakuan (*mutual recognition*) dengan APLAC dan ILAC.

Dalam kegiatan pengujian, selain pengujian tekstil juga termasuk di dalamnya kegiatan pengujian air dan limbah cair. Laboratorium ini telah direakreditasi pada tahun 2012 oleh KAN. Dukungan peralatan pengujian air dan limbah cair diperoleh dari bantuan dana Asian Development Bank tahun 1999 dan selanjutnya secara bertahap dilengkapi dengan penambahan beberapa alat yang dibutuhkan dari anggaran DIPA BBT.

Penerimaan JPT dari jasa pengujian selama delapan tahun cenderung meningkat. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan JPT Pengujian yang tersaji pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Penerimaan JPT Pengujian Tahun 2009 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2009	2.174.100.000	1.901.584.544	87,5
2010	1.900.000.000	1.539.275.930	81,0
2011	1.800.000.000	1.789.950.000	99,4
2012	2.350.000.000	2.371.684.500	100,9
2013	2.150.000.000	2.081.812.800	96,8
2014	2.400.000.000	2.929.238.990	121,93
2015	3.700.000.000	3.553.477.238	96,04
2016	2,992,500,000	3,126,610,773	104,48
2017	3,000,400,000	2,801,841,750	88,45

Dalam rangka pemberlakuan SNI wajib TPT dan mainan anak, Kemenperin menugaskan BBT sebagai instansi pelaksana teknis dalam mendukung program pemberlakuan SNI wajib tersebut. Untuk tahun anggaran 2011 - 2014 BBT telah mendapatkan anggaran untuk pengadaan peralatan uji mainan anak. Dengan pemberlakuan SNI wajib tersebut diharapkan penerimaan PNPB dari JPT pengujian akan semakin meningkat signifikan.

Pada tahun 2013 adanya kerjasama dengan pihak KOICA Korea dalam bidang pengujian tekstil, adapun isi dari kerjasama tersebut antara lain; pengadaan peralatan pengujian dari Pemerintah Korea. Selain, pelatihan SDM pengujian ke Korea, serta pengiriman tenaga ahli pengujian dari Korea di Indonesia. Diharapkan pula dengan kerjasama ini dapat meningkatkan jasa pelayanan teknis di bidang pengujian.

2) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis

BBT memberikan jasa pelayanan teknis seperti teknologi tekstil, manajemen proses, sistem manajemen mutu, lingkungan dan sosial,

pengembangan desain tekstil, pengendalian mutu dan lain-lain. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan JPT Pelatihan Teknis selama tahun 2009 s.d. 2017 yang tersaji pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Penerimaan JPT Pelatihan Teknis
Tahun 2009 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2009	780.900.000	742.400.000	95,1
2010	700.000.000	507.400.000	72,5
2011	725.000.000	200.500.000	27,7
2012	270.000.000	222.526.100	82,4
2013	300.000.000	146.700.000	48,9
2014	190.000.000	193.925.726	102,07
2015	120.000.000	115.386.364	96,16
2016	135.000.000	104.950.000	77,74
2017	135.000.000	131.950.000	97,74

Dilihat dari tabel di atas, penerimaan PNBPN dari JPT pelatihan menurun pada tahun 2011, dikarenakan kerjasama dengan JICA Jepang untuk pelatihan tekstil bagi IKM telah selesai. Untuk terus meningkatkan PNBPN dari JPT pelatihan, penyelenggaraan pelatihan teknis terus berupaya berinovasi dengan memenuhi kebutuhan pelanggan seperti pelatihan spesifikasi pakaian untuk seragam bagi panitia lelang atau penyedia jasa, pelatihan pengujian, pelatihan kalibrasi dan lain-lain. Bahkan sejak tahun 2011 telah dilakukan pendekatan dengan beberapa bank swasta untuk menawarkan pelatihan manajemen industri tekstil, dan pelatihan tersebut telah berhasil dilaksanakan di 2 bank swasta, masing-masing tahun 2011 dan 2012.

Dalam rangka pemberlakuan SNI wajib TPT dan mainan anak, diharapkan juga layanan jasa pelatihan mendapatkan PNPB dengan menawarkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan SNI wajib.

3) Rancang Bangun dan Perakayasaan Alat / Mesin

Rancang bangun dan perakayasaan industri (RBPI) yang dilaksanakan oleh BBT banyak digunakan oleh IKM Tekstil terutama dalam pembuatan mesin atau peralatan tepat guna untuk pengolahan rami, sutera dan pembuatan kain dengan menggunakan ATBM biasa atau ATBM Dobby/Jacquard. Kegiatan lainnya yang pernah dilaksanakan antara lain jasa pelayanan teknis pembuatan IPAL untuk industri TPT.

Penerimaan JPT dari jasa Rancang Bangun dan Perakayasaan selama lima tahun terakhir fluktuatif. Hal ini dikarenakan naik turunnya kebutuhan dari IKM Tekstil yang terkena imbas krisis ekonomi. Berikut target dan realiasi penerimaan JPT dari RBPI yang tersaji pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10.
Target dan Realisasi Penerimaan JPT
Rancang Bangun dan Perakayasaan Alat/Mesin
Tahun 2009 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2009	75.000.000	25.000.000	33,3
2010	30.000.000	15.000.000	50,0
2011	50.000.000	0	0
2012	30.000.000	2.500.000	8,3
2013	25.000.000	23.000.000	92
2014	20.000.000	0	0
2015	0	0	0
2016	15.100.000	12.431.000	82,32
2017	2.200.000	2.200.000	100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan PNBP dari JPT RBPI selama 5 tahun terakhir fluktuatif, hal ini salah satunya disebabkan karena selain kondisi IKM itu sendiri juga peralatan atau mesin hasil RBPI sudah banyak ditiru oleh kompetitor dengan harga yang kompetitif. Hal ini menjadikan BBT terus berinovasi baik itu penyempurnaan mesin dan peralatan yang telah dibuat atau membuat peralatan baru untuk menghasilkan produk yang baru, salah satu contohnya adalah membuat dan menyempurnakan peralatan/mesin non woven dengan bahan baku serat alam. Tantangan lain yang cukup berat adalah bagaimana membuat hasil RBPI ini menjadi murah dan efektif, karena penggunaannya sebagian besar adalah IKM. Melalui kegiatan penelitian dalam pembuatan RBPI, diharapkan hasil penelitian tersebut sebagai suatu inovasi dapat dikomersialisasikan sebagai PNBP dari JPT RBPI. Selain itu juga dengan membangun kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam pembuatan peralatan atau mesin, dengan kerjasama yang menguntungkan.

4) Kalibrasi

Jasa kalibrasi pada industri TPT merupakan jasa pelayanan teknis Balai Besar Tekstil yang relatif baru, namun ditinjau dari aktivitasnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan industri TPT pada Balai Besar Tekstil dalam hal kalibrasi alat uji tekstil. Jumlah alat uji yang dikalibrasi dari tahun ke tahun semakin meningkat dan alat yang dikalibrasi juga semakin bervariasi. Ada beberapa alat yang disarankan untuk dikalibrasi setiap dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang alat tersebut tetap berfungsi dengan baik. Sebagian perusahaan ada yang sudah mampu menangani kalibrasi internalnya dengan tenaga kalibrasi sendiri yang telah dilatih oleh tenaga ahli kalibrator dari Balai Besar Tekstil dan hanya mengkalibrasikan acuannya ke Balai Besar Tekstil.

Laboratorium Kalibrasi Balai Besar Tekstil telah terakreditasi oleh KAN dan telah mengimplementasikan persyaratan ISO 17025. Mengingat

pasar jasa kalibrasi secara nasional sangat potensial, semakin kuatnya kepercayaan industri TPT terhadap jasa kalibrasi Balai Besar Tekstil, status Lab. Kalibrasi yang telah terakreditasi dan belum adanya pesaing yang masuk pada jasa kalibrasi ini, diharapkan dengan promosi yang intensif dan terencana, bagian pasar jasa kalibrasi yang dapat diraih Balai Besar Tekstil akan semakin besar di masa mendatang.

Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, penerimaan JPT dari jasa kalibrasi tergolong stabil. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan JPT dari jasa kalibrasi yang tersaji pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11.
Target dan Realisasi Penerimaan JPT Kalibrasi
Tahun 2009 – 2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2009	130.000.000	108.927.000	83,8
2010	130.000.000	140.841.000	108,3
2011	280.000.000	260.260.120	93,0
2012	300.000.000	293.589.228	97,9
2013	345.000.000	351.798.700	102,0
2014	450.000.000	488.492.100	108,55
2015	500.000.000	631.568.064	126,31
2016	600.000.000	626.020.069	104,33
2017	500.000.000	577.144.000	115,43

5) Konsultansi

Perusahaan tekstil nasional saat ini sekitar 2.980 unit pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut sebagian besar perusahaan berlokasi di Bandung. Beberapa pesaing baru yang memberikan jasa konsultansi masih dalam taraf permulaan dan hanya pada bidang tertentu saja, sehingga dapat dikatakan belum merupakan ancaman serius apalagi mengingat bagian pasar bidang tekstil sangat besar. Perusahaan tersebut

adalah pelanggan potensial bagi Balai Besar Tekstil yang diharapkan akan menggunakan jasa pelayanan teknis baik bidang teknis maupun manajerial yang dapat disediakan oleh Balai Besar Tekstil.

Kegiatan jasa konsultasi ini meliputi : set up ISO 9001 : 2008, ISO 14000, SA 8000, bantuan teknis peningkatan daya saing industri melalui penerapan konservasi energi dan pengelolaan pabrik, appraisal mesin tekstil, , appraisal kinerja perusahaan tekstil, *feasibility study*, dan lain-lain.

Melihat prospek dari pelaksanaan SNI wajib untuk produk tekstil dan mainan anak, BBT harus mempersiapkan diri untuk beberapa jasa konsultasi pendukung pelaksanaan SNI wajib, seperti jasa konsultasi untuk mendapatkan sertifikasi produk sesuai persyaratan SNI dan jasa konsultasi set up Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Mengingat adanya kecenderungan naiknya permintaan akan jasa pelayanan teknis konsultasi dan ragam jasa konsultasi yang dibutuhkan di masa mendatang, BBT perlu meningkatkan kemampuan jasa pelayanan teknis konsultasinya terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia industri, pengembangan teknologi industri dan pengembangan produk serta penanggulangan pencemaran lingkungan.

Penerimaan JPT dari jasa konsultasi selama lima tahun (tahun 2009 sampai dengan 2017) tersaji pada Tabel 1.12.

Tabel 1.12.
Target dan Realisasi Penerimaan JPT Konsultasi
Tahun 2009 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2009	285.000.000	158.547.841	55,6
2010	150.000.000	94.158.400	62,8
2011	175.000.000	122.900.000	70,2

2012	180.000.000	156.500.000	86,9
2013	200.000.000	46.818.182	23,4
2014	45.000.000	29.312.727	62,92
2015	40.000.000	20.000.000	50,00
2016	20.000.000	16.380.000	81,90
2017	210.000.000	159.825.000	76,11

6) Sertifikasi

BBT memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro TEXPA), dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (TIQA) lembaga-lembaga tersebut telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LSPro TEXPA telah melayani kebutuhan industri TPT yang memerlukan sertifikasi produk penggunaan tanda (SPPT) SNI, tercatat ada 21 industri TPT yang menyertifikasi produknya dengan beberapa nama dagang dari setiap industri. Dalam menjalankan proses sertifikasinya, seluruh personel LSPro TEXPA BBT yang terlibat di dalamnya bersifat objektif, tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga proses sertifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ISO 17067:2013 dan 17065:2012. TIQA diberi kewenangan untuk memberikan sertifikat SNI ISO 9001:2008 kepada Industri TPT. TIQA didukung oleh para tenaga Lead Auditor yang bersertifikat antara lain dari Nevile-Clarke dan Quality Management International Inggris serta memiliki pendidikan pengalaman di bidang Tekstil baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam menjalankan proses sertifikasinya, seluruh personel TIQA yang terlibat didalamnya bersifat objektif, tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga proses sertifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ISO 17021: 2011. Saat ini TIQA-BBT telah memberikan sertifikat kepada 8 perusahaan tekstil yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008.

Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan SNI Wajib Produk Tekstil dan Mainan Anak, maka jasa sertifikasi produk TPT ini menjadi sangat penting. BBT sebagai salah satu lembaga pemerintah yang

bergerak dalam bidang jasa pelayanan teknis teknologi tekstil memiliki peran strategis dalam kegiatan jasa sertifikasi ini karena keberadaannya sebagai lembaga yang netral sangat dibutuhkan baik oleh konsumen maupun produsen dalam perdagangan TPT. Diprediksi dengan penerapan SNI wajib tersebut layanan jasa sertifikasi akan mendapatkan PNBPN yang cukup besar pada tahun –tahun mendatang.

Penerimaan JPT dari jasa Sertifikasi selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 tersaji pada Tabel 1.13. berikut ini.

Tabel 1.13.
Target dan Realisasi Penerimaan JPT Sertifikasi
Tahun 2009 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2009	75.000.000	53.750.000	71,7
2010	80.000.000	48.500.000	60,6
2011	120.000.000	121.750.000	101,5
2012	175.000.000	172.275.000	98,4
2013	200.000.000	109.450.000	54,7
2014	320.000.000	327.078.508	102,21
2015	750.000.000	1.074.113.966	143,22
2016	880.400.000	877.250.000	99,64
2017	1.105.400.00	786.425.000	67,03

7) Standardisasi dan Litbang

Jasa standardisasi dan litbang ini merupakan jasa pelayanan teknis kegiatan BBT yang penerimaannya relatif masih kecil. BBT setiap tahunnya melakukan pengkajian terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah digunakan. Dalam era pasar bebas dan diberlakukannya pembebasan kuota tekstil yang berlaku awal tahun 2005, serta penerapan SNI wajib produk tekstil dan mainan anak yang diterapkan pada tahun 2013, standardisasi menempati posisi penting. Selama ini kegiatan

standardisasi diperoleh dari Pusat Standardisasi BPPI, Direktorat Jenderal BIM Kemenperin dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang hampir setiap tahun selalu ada, namun volumenya untuk bidang tekstil ini relatif masih kecil karena mengandalkan anggaran dari Pemerintah. Dengan pemberlakuan SNI wajib dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kualitas produk TPT dan tuntutan globalisasi perdagangan dunia TPT, kegiatan jasa standardisasi produk TPT dari industri TPT ini diharapkan akan semakin meningkat di masa yang akan datang.

Target dan realisasi penerimaan JPT dari jasa Standardisasi dan Litbang tersaji pada Tabel 1.14 berikut.

Tabel 1.14.
Target dan Realisasi Penerimaan JPT Standardisasi dan Litbang
Tahun 2009 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2009	100.000.000	34.550.000	34,6
2010	60.000.000	60.000.000	100,0
2011	40.000.000	30.660.000	76,7
2012	60.000.000	63.660.000	106,1
2013	60.000.000	60.501.818	101,8
2014	40.000.000	28.925.000	72,31
2015	0	0	0,00
2016	0	0	0,00
2017	0	0	0,00

8) Teknologi Proses

Jasa Pelayanan Teknis Lainnya ini merupakan kerjasama dengan pihak ketiga yang umumnya adalah pengusaha kecil atau IKM dengan memanfaatkan kemampuan teknologi proses Balai dan fasilitas laboratorium BBT seperti Lab Garmen, Lab Perajutan, Lab Pertenunan, Lab Teknologi Kimia Tekstil (TKT) dan Lab-lab lainnya. Dengan adanya

PDDC yang *launching* pada tahun 2011 diharapkan jasa layanan ini dapat meningkat dengan kerjasama dari beberapa industri. PDDC telah dilengkapi beberapa mesin dengan teknologi proses yang baru seperti mesin tenun Jacquard elektronik dan mesin rajut bundar seamless. Dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan dari PDDC, diharapkan pengusaha/IKM tidak hanya memanfaatkan kemampuan teknologi proses saja tetapi juga mereka dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut yang akhirnya dapat dikomersialisasikan. Dalam memanfaatkan hasil inovasi tersebut, mereka akan membutuhkan konsultasi atau pelatihan dari innovator PDDC, baik itu peneliti maupun perekayasa.

Investasi untuk melengkapi mesin-mesin tersebut di dalam PDDC telah diupayakan dengan memanfaatkan agen atau supplier mesin dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang berhasil telah dilakukan antara BBT dengan salah satu supplier ialah menitipkan satu buah mesin rajut bundar di dalam gedung PDDC. Kerjasama yang sedang dirintis juga antara lain dengan pabrikan mesin rajut Ionati Italy pada tahun 2012, dengan harapan agar mereka juga dapat menitipkan sebuah mesin rajut di BBT.

Selama tahun 2009 s.d. 2017 penerimaan JPT dari jasa teknologi proses tersaji pada Tabel 1.15.

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Penerimaan JPT Teknologi Proses
Tahun 2009 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2009	194.000.000	138.900.000	71,6
2010	150.000.000	132.000.000	88,0
2011	160.000.000	111.000.000	69,4
2012	105.000.000	78.000.000	74,3
2013	190.000.000	137.731.680	72,5
2014	135.000.000	137.872.726	102,13

2015	80.000.000	82.000.000	102,50
2016	132.000.000	80.500.000	60,98
2017	47.000.000	12.000.000	25,53

9) Wisata Tekstil

Jasa Pelayanan Teknis Lainnya ini merupakan layanan jasa wisata tekstil yang baru dikembangkan sejak tahun 2015. BBT mempunyai 2 tupoksi penting yaitu sebagai lembaga litbang dan layanan jasa teknis di bidang tekstil. Dalam menjalankan tupoksi tersebut BBT sebagai lembaga jasa dan penelitian tekstil memiliki banyak fasilitas produksi tekstil, mulai dari proses perajutan, pertenunan, garmen, pengujian tekstil dan sebagainya yang juga dapat disuguhkan kepada berbagai pihak dan terutama wisatawan yang datang berkunjung ke Bandung yang terkenal sebagai kota fesyen.

Kebanyakan orang hanya mengetahui hasil produk tekstil dari segi perdagangan (jual beli) dan pemakaiannya (fesyen). Untuk mengetahui proses produksi yang lebih detail seperti pertenunan, perajutan dan lainlain kita harus langsung mengunjungi pabrik atau industri tekstil. Hal ini tidak mudah dilakukan oleh masyarakat umum apalagi dalam jumlah besar (rombongan) karena pihak pabrik belum tentu siap menerima kunjungan seperti ini. Dengan adanya wisata tekstil ini masyarakat umum dapat berkunjung ke BBT, mendapatkan pengalaman baru dan menambah wawasan dunia tekstil.

Selama tahun 2015 s.d. 2017 penerimaan JPT dari jasa wisata tekstil tersaji pada Tabel 1.16.

Tabel 1.16
Target dan Realisasi Penerimaan JPT Teknologi Proses
Tahun 2009 - 2017

Tahun	Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2015	2.905.000	-
2016	6.105.000	-
2017	4.855.000	

2. Permasalahan

a) Hambatan tarif dan non tarif

Terkait hambatan tarif, sejak diberlakukannya *Free Trade Agreement (FTA)* baik kerjasama bilateral, regional maupun global terjadi penurunan tarif bea masuk yang berlaku sama untuk semua negara, sehingga hambatan *tarif* tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai instrumen untuk perlindungan produk dalam negeri. Di sisi lain, negara-negara yang mengikuti FTA saat ini sudah siap menerapkan hambatan-hambatan *non tarif* seperti penerapan standar, Hak atas Kekayaan Intelektual, issue HAM, penerapan industri ramah lingkungan melalui penerapan *cleaner production/eco-efficiency, eco-friendly product* dan hambatan lainnya, ketika hambatan tarif tidak dapat diberlakukan lagi. Tanpa adanya hambatan non tarif, akses produk-produk dunia ke pasar kita akhirnya menjadi sangat mudah, sedangkan untuk produk nasional agar dapat memasuki pasar global, maka masalah hambatan non tarif harus diberdayakan. Industri TPT sangat berkaitan dengan hal tersebut terutama masalah lingkungan karena dampak dari proses produksi tekstil terutama *dyeing finishing* banyak menimbulkan pencemaran lingkungan dan di beberapa industri (hulu dan tengah) masih boros energi.

b) Utilisasi Kapasitas Terpasang

Utilisasi kapasitas terpasang dan terbatasnya kemampuan permesinan yang mendukung proses produksi. Data terakhir menunjukkan lebih dari 80 persen

mesin TPT telah berusia lebih dari 20 tahun sehingga terjadi *in-efisiensi* dalam proses produksi. Di samping itu, teknologi yang digunakan membatasi keleluasaan industri dalam hal melakukan diversifikasi produk dan pencapaian kualitas yang diinginkan. Menyadari kondisi permesinan yang sudah tua ini, maka sejak tahun 2007 sampai saat ini (2014) Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program Restrukturisasi Permesinan yang memberi insentif berupa potongan harga bagi dunia usaha yang merestrukturisasi mesinnya. Sampai saat ini program tersebut mendapat sambutan positif, tercermin dengan tingginya jumlah pemohon yang mengajukan keringanan pembiayaan yang mencapai 231 perusahaan pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 dari 175 perusahaan yang mengajukan permohonan, hanya 134 perusahaan yang dapat diproses, dengan nilai investasi mencapai 73,54 milyar rupiah. Pada tahun 2012 alokasi bantuan permesinan sebesar 1,75 triliun rupiah. Satu hal yang cukup menggembirakan dari program ini adalah, ternyata peremajaan mesin yang dilakukan telah mampu meningkatkan penghematan penggunaan energi sekitar 2-7 persen dan peningkatan produktivitas sebesar 4-9 persen yang merupakan bagian dari upaya menuju industri hijau.

c) Ketergantungan Import untuk Bahan Baku Kapas dan Bahan Penolong

Ketergantungan bahan baku kapas yang mencapai 98 persen dari total kebutuhan bahan baku kapas nasional. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan tanpa henti, di antaranya adalah dengan menggali potensi *Sumber Daya Alam* nasional yang dapat menjadi bahan substitusi bahan baku tekstil, misalnya pengembangan serat rami/haramay, nanas, dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan bahan penolong tekstil seperti zat warna tekstil yang sebagian besar masih diimpor dari luar negeri. Sementara itu, rendahnya kualitas zat warna sintetis yang diimpor juga berdampak tidak ramah lingkungan karena mengandung limbah B3. Jika masih harus dilakukan pengolahan atas limbah tersebut maka akan membutuhkan investasi yang tidak kecil.

d) Kualitas Produk TPT Nasional

Kualitas produk TPT nasional yang relatif masih rendah. Secara teknis, rendahnya kualitas produk TPT antara lain disebabkan oleh faktor-faktor kerataan benang, kerapatan kain tenun, mudah luntur, mudah kusut, dan sebagainya. Disinilah diperlukan sentuhan litbang untuk peningkatan kualitas produk TPT nasional.

e) Kondisi Litbang Nasional

Adanya kecenderungan berkurangnya pendanaan dari negara dan kurangnya perhatian industri TPT pada pembiayaan litbang dalam situasi perekonomian nasional yang belum membaik ini, harus dipandang sebagai pendorong bagi Balai Besar Tekstil untuk menunjukkan kemampuannya dan mengarahkan hasil litbangnya secara tepat kepada “*stakeholder*” baik dari pemerintah, industri TPT dan pihak terkait lainnya.

Secara umum industri TPT nasional belum ditunjang oleh litbang yang kuat. Industri TPT tumbuh dengan teknologi dari luar, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya sangat tergantung pada induk pemilik teknologi tersebut. Bahan baku terutama kapas hampir 98% dari kebutuhan nasional masih diimpor, dan sisanya merupakan produksi kapas dalam negeri. Sementara serat alam non kapas seperti rami yang diharapkan sebagai bahan baku komplemen dari kapas impor belum dapat dimanfaatkan secara optimal mengingat kendala ketidaktersediaan mesin-mesin pengolah dan teknologi proses yang belum sepenuhnya dikuasai. Potensi yang besar lainnya yaitu sutera mengalami hal yang sama sehingga pengembangan sutera di masa mendatang perlu mendapat perhatian semua pihak.

Pengelolaan dan mutu lingkungan alam akan menjadi faktor penting dalam perdagangan internasional di masa depan. Mitra dagang Indonesia akan makin menekankan berbagai standar lingkungan yang berlaku secara internasional melalui sertifikasi dan ekolabel. Indonesia wajib mengikuti standar-standar lingkungan internasional dimaksud.

Telah dipahami secara umum bahwa perkembangan industri harus memperhatikan keamanan dan kesehatan lingkungan serta tidak berkontribusi pada polusi. Oleh sebab itu akan terjadi peningkatan kebutuhan untuk pelatihan, peranan pemantauan dan perijinan lingkungan serta kebutuhan litbang pendukungnya.

Perdagangan, perindustrian dan lingkungan sudah menjadi hal-hal yang tidak dapat dipisahkan lagi dalam dunia internasional, sehingga dukungan litbang dan jasa pelayanan teknis seperti pengujian, standardisasi, sertifikasi, kalibrasi, konsultasi dan pelatihan adalah faktor yang sangat penting untuk pengembangan industri TPT nasional dalam meningkatkan daya saing produk TPT di pasar global.

f) Pesaing

Pesaing jasa pelayanan teknis Balai saat ini berasal dari PT. Sucofindo, STTT, Intertex, UII, Metrologi, B4T, SGS, Balai Tekstil Jakarta dan beberapa pesaing baru lainnya. Sebagian besar pesaing Balai memiliki spesialisasi dalam memberikan jasa layanannya misalnya ada yang mengkhususkan di bidang testing, kalibrasi, pelatihan, perekayasaan mesin/alat dan sistem manajemen mutu. Kemungkinan di masa yang akan datang, pesaing baru Balai masih akan terus bermunculan dengan mengambil spesialisasi tertentu seperti tersebut di atas.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk memenuhi amanat Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinerjitas antar fungsi serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengembangan dalam rangka tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan UU tersebut, Renstra Balai Besar Tekstil 2015 – 2019 merupakan perwujudan dari implementasi

kebijakan Industri Nasional Jangka Panjang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 sebagaimana Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008, Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri 2015 - 2019.

Revisi Kedua Renstra Balai Besar Tekstil 2015 - 2019 memberikan arah kebijakan dan strategi bagi stakeholder dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program dengan perubahan yang terjadi, serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2015-2019, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Balai Besar Tekstil.

D. Pendekatan

Revisi Kedua Rencana Strategis Balai Besar Tekstil merupakan bagian Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Rencana Strategis BPPI dengan ruang lingkupnya mencakup: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan perkuatan kompetensi inti Balai Besar Tekstil dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019.

Dalam menetapkan misi dan kondisi yang diharapkan juga mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan kondisi industri saat ini. Setelah penetapan visi yang akan dicapai dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025, selanjutnya dijadikan dasar untuk menetapkan misi yang akan diemban sampai 5 tahun ke depan, kondisi yang diharapkan pada tahun 2019, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan tersebut selanjutnya perlu ditetapkan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diperlukan. Berdasarkan strategi tersebut, dilakukan penjabaran kegiatan-kegiatan yang dinyatakan sebagai Rencana Kerja lengkap dengan sumber daya, kapasitas kelembagaan dan tata laksana yang akan dipergunakan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan tersebut.

Perumusan strategis di atas perlu dilengkapi dengan pendekatan implementasi program yang terintegrasi. Dua strategi fungsional yaitu penelitian dan pengembangan teknologi serta peningkatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) menjadi strategi yang diperlukan untuk pelaksanaan penyusunan dan evaluasi program BBT. Program ini memerlukan pengelolaan yang profesional akan sumber daya antara lain SDM, organisasi dan kelembagaan, informasi, perencanaan, dan dana.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) yang tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional adalah **Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia** yang bercirikan:

1. Industri kelas dunia;
2. Memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi;
3. Kemampuan yang berimbang dan merata antara skala usaha (IKM dan industri besar);
4. Memiliki struktur industri yang kuat;
5. Industri menjadi penggerak utama ekonomi;
6. Industri berperan besar dan memberikan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian serta visi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, BBT sebagai salah satu unit eselon II mempunyai visi:

“Menjadi lembaga litbang dan jasa layanan teknis yang unggul dan terpercaya di bidang tekstil ”

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Tekstil dan memperhatikan harapan stakeholder serta persaingan yang semakin ketat maka Balai Besar Tekstil memfokuskan pada inovasi sebagai keunggulan kompetitif, selanjutnya misi Balai Besar Tekstil dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan penguatan kompetensi melalui inovasi teknologi

- b. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional
- c. Meningkatkan jejaring kerja dengan lembaga lain

C. Kondisi Yang Diharapkan Tahun 2005 – 2025

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005 – 2025 sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 17 Tahun 2007, dalam pembangunan jangka panjang, pembangunan industri antara lain diarahkan untuk menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia.

Sedangkan pembangunan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang andal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana iptek.

Dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2015 - 2019 telah dirumuskan kondisi yang diharapkan untuk kurun waktu tahun 2005 - 2025 antara lain terjadi pergeseran pertumbuhan industri dari industri berbasis tenaga kerja dan industri berbasis sumber daya alam ke industri padat modal dan industri berbasis teknologi yang didukung oleh kemampuan teknologi dan R&D sebagai ujung tombak daya saing industri.

Sesuai dengan visi BPPI tahun 2025, menjadi Lembaga Penyedia Rumusan Kebijakan yang Visioner dan Pelayanan Teknis Teknologis Terkini yang Profesional bagi Sektor Industri Nasional, dan arah kebijakan 2005-2025 di atas serta Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019 maka dapat dirumuskan kondisi yang diharapkan untuk kurun waktu tahun 2005 - 2025 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya peran litbang dalam pembangunan industri nasional;

- 2) Kemandirian dalam membangun industri dan memproduksi barang terutama industri berbasis agro, industri telematika, dan industri alat angkut;
- 3) Industri manufaktur sudah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan;
- 4) Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis penerapan dan komersialisasi HKI;
- 5) a. SNI diakui secara internasional
b. LPK di lingkungan Kementerian Perindustrian yang kredibel di tingkat Internasional
- 6) Kebijakan teknis (smart regulation) yang sinergi dan kondusif bagi peningkatan daya saing sektor industry;
- 7) Tercapainya kemandirian dalam penyediaan bahan baku/penolong berbasis SDA lokal bagi industri nasional.

D. Kondisi yang diharapkan 2015 - 2019

Sesuai dengan yang diharapkan dalam Arah Kebijakan industri Nasional, Renstra Kemenperin dan Renstra BPPI, maka BBT merumuskan kondisi yang diharapkan, antara lain :

- 1) Product and Design Development Center (PDDC) sudah berjalan sebagai pusat inovasi teknologi dan pelayanan jasa teknis Balai Besar Tekstil yang diharapkan kedepan menjadi kebanggaan BPPI dan Kementerian Perindustrian.
- 2) Peningkatan Jasa Pelayanan Teknis kepada pelanggan yang semakin professional dengan target PNBPN dari jasa pelayanan teknis mencapai Rp. 5,2 milyar.
- 3) Terciptanya inovasi-inovasi teknologi dan produk hasil litbang yang aplikatif dalam rangka membantu pengembangan industri TPT.

E. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi, dan kondisi yang diharapkan maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai BBT sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hasil litbang bidang tekstil,
2. Meningkatkan layanan jasa teknis yang professional dan berorientasi pada pelanggan,

3. Meningkatkan kualitas produk/jasa,
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta membangun budaya korporasi.

Tujuan tersebut memiliki indikator :

1. Hasil litbang yang diaplikasikan di industri;
2. Realisasi Penerimaan PNBPN;
3. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
4. Indeks kepuasan pelanggan;
5. Tingkat maturitas SPIP.

Untuk mencapai tujuan tersebut dicapai melalui beberapa sasaran strategis, antara lain :

Sasaran strategis 1 :

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan di industri
- 2) Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan di industri
- 3) Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan di jurnal ilmiah
- 4) Jumlah kerjasama litbang

Sasaran strategis 2 :

Meningkatnya pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan sesuai harapan pelanggan dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah realisasi PNBPN sebesar 100% dalam waktu 5 tahun (milyar rupiah)
- 2) Jumlah sampel yang diuji (ribu)
- 3) Jumlah SDM industri yang menjadi peserta pelatihan yang diadakan satker
- 4) Jumlah alat yang dikalibrasi
- 5) Jumlah perusahaan yang disertifikasi
- 6) Jumlah prototip alat yang dihasilkan
- 7) Jumlah perusahaan yang mendapatkan konsultasi

- 8) Jumlah perusahaan yang diinkubasi
- 9) Jumlah RSNi yang dihasilkan

Sasaran strategis 3 :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks kepuasan pelanggan
- 2) Persentase minimal ketepatan pelayanan sesuai SPM/SPK
- 3) Jumlah permintaan yang dilayani
- 4) Persentase jumlah komplain yang diselesaikan

Sasaran strategis 4 :

Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dalam tupoksi
- 2) Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam rangka tupoksi
- 3) Tingkat Maturitas SPIP

BAB III ARAH KEBIJAKAN

A. Arah kebijakan dan Strategi BPPI

Sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 dan RPJMN serta Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, maka arah kebijakan BPPI dalam kelitbang industri Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju;
- b. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan HKI;
- c. Peningkatan kualitas hasil litbang industri;
- d. Peningkatan pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis SNI lingkup industri;
- e. Peningkatan pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang efektif;
- f. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau;
- g. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri.

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bagi setiap misi yang diemban, BPPI menjabarkan strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam strategi dan strategi implementasi. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, BPPI menetapkan empat strategi berikut strategi implementasinya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan jejaring dengan lembaga-lembaga pengkajian kebijakan dan litbang teknologi yang terkemuka. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan/mengembangkan jejaring dengan lembaga pengkajian kebijakan dan litbang teknologi terkemuka antara lain:
 - Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi internasional dan regional, seperti UNIDO, ISO, IEC, JETRO, JICA, KITECH dan lain-lain;

- Memanfaatkan kerangka kerjasama perdagangan bebas, seperti AFTA, ACFTA, ASEAN-Korea FTA, IJ-EPA, APEC dan lain-lain;
 - Mengembangkan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar lembaga litbang (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung) baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir
- Mengembang kapasitas/kemampuan IT yang telah tersedia;
 - Mengoptimalkan sarana dan prasana IT yang tersedia, baik;
 - Memanfaatkan para atase industri dalam peroleh data di negara yang bersangkutan;
 - Menjalin kerjasama dengan BPS sebagai *resource* data
- c. Meningkatkan kompetensi SDM BPPI sesuai perkembangan IPTEK industri
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM litbang melalui berbagai program pendidikan (S2 dan S3) dan pelatihan;
 - Melakukan optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM litbang melalui kerjasama nasional maupun internasional;
 - Merintis program magang dengan pihak-pihak terkait seperti industri dan lembaga litbang lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan LPK
- Melakukan revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan termasuk akreditasi litbang;
 - Mengembangkan pusat-pusat inovasi di daerah, dan aktualisasi peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi
 - Mengembangkan prasarana untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian atas mutu produk pelaku usaha ;
 - Menyiapkan lembaga penilaian kesesuaian agar terakreditasi secara nasional dan internasional
 - Mengusulkan penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BBT

1) Kebijakan BBT

Sesuai dengan kebijakan strategis BPPI, dan kompetensi inti BBT, maka pada revisi rencana strategis 2015 – 2019 ini, BBT mengedepankan kebijakan :

1. Menitikberatkan pada litbang bidang tekstil sesuai dengan kompetensi inti yaitu pengembangan desain dan produk bidang tekstil dan produk tekstil yang kemudian berkembang menjadi **Functional Textile and Green Textile**.
2. Peningkatan Jasa Pelayanan Teknis melalui kemitraan strategis dengan industri TPT, organisasi sejenis, perguruan tinggi, organisasi profesi dan lembaga lain baik nasional maupun internasional.
3. Peningkatan kualitas produk/jasa,
4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme serta membangun budaya korporasi yang mampu meningkatkan dan memelihara reputasi Balai.

2) Strategi BBT

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bagi setiap misi yang diemban, BBT menjabarkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Adapun strategi tersebut adalah:

1. **Dalam rangka memperkuat kompetensi inti BBT yaitu “Pengembangan Produk dan Desain Tekstil dan Produk Tekstil”, maka dibuat sebuah konsep yang bernama *Product Development and Design Center (PDDC)*. PDDC merupakan program *back to basic* dimana program kegiatannya lebih diarahkan kepada penguatan struktur/processing industri TPT, yang meliputi *fiber making, spinning, weaving, knitting, dyeing/printing/finishing*, dan *textile products*. Kegiatan PDDC melaksanakan enam kegiatan processing sebagai berikut:**
 1. Processing sutera dan campurannya;
 2. Pengembangan produk dan desain tenun (*dobby dan jacquard*);
 3. Pengembangan produk *knitting (warp, flat, circle)*;
 4. Pengembangan produk *non woven*;

5. Pengembangan *advance material* berbasis nanotech pada *dyeing/printing/finishing*, dan

6. Pengembangan produk dan desain garmen.

Dengan adanya perkembangan teknologi maka kompetensi inti Balai Besar Tekstil berkembang dan berubah menjadi "Functional Textile and Green Textile", diharapkan Balai Besar Tekstil selain sebagai pusat inovasi di bidang tekstil dan produk tekstil juga sebagai pusat inovasi dan kerjasama dalam penelitian di bidang Functional Textile and Green Textile. **Kegiatan litbang menitikberatkan kepada kompetensi inti dengan pengembangan produk dan desain TPT yang merupakan inovasi teknologi tekstil yang mencakup seluruh aspek produk, desain dan proses teknologi dalam satu pusat pengembangan desain dan produk TPT yaitu PDDC yang kemudian berkembang menjadi pusat inovasi dan kerjasama tekstil diantaranya yaitu:**

- Pengembangan penelitian di bidang tekstil medis;
- Pengembangan penelitian di bidang comfort/smart apparel;
- Pengembangan penelitian di bidang Geotekstil dan agrotekstil;
- Pengembangan penelitian di bidang tekstil otomotif;
- Pengembangan penelitian bahan baku berbasis SDA dan advance material melalui nano teknologi;
- Proses tekstil dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang diperoleh;
- Desain kain mengarah ke pengembangan desain kain tenun, knitting dan non-woven, sedangkan desain garmen diarahkan ke high fashion;
- Kerjasama riset pengembangan bahan baku dari serat alam non kapas;
- Kerjasama riset pengembangan serat alam dan serat buatan untuk tekstil fungsional;
- Pendirian Pusat Inovasi di daerah-daerah dengan bekerjasama dengan Pemda setempat;
- Kerjasama penanganan limbah dan konservasi energi;

- Kerjasama pengolahan limbah serat proses tekstil dan peningkatan nilai tambah produk

Gedung PDDC lebih berkembang kepada jenis penelitian dan pengembangan dengan meningkatkan invensi dan inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kemandirian industri TPT nasional serta peningkatan nilai tambah dan daya saing TPT nasional di lingkup global pada umumnya.

2. Meningkatkan hubungan kerjasama baik dalam rangka litbang maupun layanan jasa teknis dengan organisasi internasional dan nasional.

- Kerjasama dalam bidang konservasi energi dengan JICA Jepang, dengan mengirimkan tenaga ahli ke BBT untuk pengembangan kompetensi SDM BBT dan pengembangan industri TPT dalam bidang konservasi energi;
- Kerjasama dengan KOICA Korea dalam bidang pengujian tekstil, dengan bentuk kerjasama pendampingan tenaga ahli dari Korea di BBT, serta mengirimkan SDM BBT ke Korea dalam rangka share knowledge dalam bidang pengujian tekstil;
- Kerjasama dengan pihak industri TPT, khususnya dalam hal implementasi dan komersialisasi hasil litbang BBT;
- Kerjasama dengan Kemenristek, LIPI, BBPT, khususnya dalam hal kerjasama kegiatan litbang dengan BBT;
- Pelatihan teknis personil pengujian dan kalibrasi untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi SDM pengujian dan kalibrasi;
- Pelatihan standar internasional;
- Pelatihan tentang pemahaman SNI Wajib;
- Pelatihan tata cara pembuatan standar;
- Pelatihan manajemen lab dan sarana litbang;
- Program pendidikan vokasi untuk industri TPT.

3. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan peningkatan kualitas layanan antara lain:

- Sertifikasi Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi ISO 17025;

- Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk layanan jasa konsultasi dan pelatihan teknis;
- Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Produk (LsPro TEXPA), dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM TIQA)

4. Mengembangkan kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan usaha antara lain:

- Meningkatkan perluasan ruang lingkup pengujian dan kalibrasi;
- Mengembangkan sarana dan prasarana;
- Mengusulkan penyempurnaan pola pembiayaan untuk penyempurnaan tarif layanan pengujian dan kalibrasi;
- Merintis program magang dengan pihak-pihak terkait seperti industri dan lembaga litbang lainnya;
- Berperan aktif dalam penyusunan standar nasional (SNI) maupun standar internasional (ISO, ASTM, AATCC) dalam Komite Teknis standar maupun yang sejenisnya;
- Mengikuti Seminar dan Workshop yang mengundang industri dari dalam negeri dan luar negeri;
- Pelatihan Manajemen Kantor Yang Ramah Lingkungan dan Hemat Energi;
- Pelatihan Cara Evaluasi Program dan Perencanaan Kegiatan Litbang;
- Pelatihan Manajemen SDM.

5. Meningkatkan kompetensi SDM sesuai perkembangan IPTEK industri

- Mendorong dan mendukung rintisan gelar bagi personel BBT untuk program pendidikan gelar S₂ dan S₃ yang mendukung kompetensi inti Balai Besar Tekstil, yaitu ;
 - Program Master dan Doktoral di bidang Tekstil;
 - Program Master/Doctoral di bidang industri hijau, pengolahan limbah, kimia, dan pelestarian lingkungan;
 - Program Master di bidang Teknologi Manufaktur;
 - Program Master di bidang Teknologi Material;
 - Program Master di bidang Manajemen Sumber Daya Alam dan Manusia;

- Program Doctoral di bidang Teknologi Pengolahan Limbah;
 - Program Master di bidang Perancangan Mesin dan Peralatan Fungsional;
 - Program Master Teknik Industri
 - Program Master Teknik Mesin
 - Program Master Studi Pembangunan Perwilayahan dan Ekonomi Terapan;
 - Program Master dibidang Administrasi dan Kebijakan Publik dan Teknologi Informasi.
- Merintis program-program pelatihan pegawai yang mendukung kompetensi inti balai antara lain :
- Pelatihan Manajemen Kantor Yang Ramah Lingkungan dan Hemat Energi;
 - Pelatihan Cara Evaluasi Program dan Perencanaan Kegiatan Litbang;
 - Pelatihan Manajemen SDM;
 - Pelatihan Manajemen Perkantoran;
 - Pelatihan lain terkait tupoksi balai seperti PBJ, Diklat administrasi umum, Sistem Industri.
- Menambah jabatan fungsional peneliti dan perekayasa dengan mengikuti pelatihan calon jabatan fungsional pelatihan dan penelitian.
- 3) Kegiatan BBT

Dalam renstra BPPI telah ditetapkan Program BPPI yaitu "Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri". Program ini bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi, energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga

kerja serta sarana dan prasarana industri sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan oleh satuan kerja di bawah BPPI sesuai dengan kompetensi masing-masing. BBT sebagai unit Eselon II di bawah BPPI melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBPN yang dihasilkan di bidang teknologi tekstil.

Untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka BBT melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan 1 : Penelitian, Kajian, dan Rekayasa, dengan indikator pencapaian jumlah penelitian, kajian dan rekayasa yang dihasilkan oleh BBT
- Kegiatan 2 : Layanan Jasa Teknis BBT, dengan indikator pencapaian; 1) Jumlah layanan jasa teknis yang diberikan oleh BBT antara lain layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, RBPI, Teknologi Proses, serta Litbang dan Standardisasi; 2) Jumlah PNBPN yang dihasilkan
- Kegiatan 3 : Pengembangan Kelembagaan, dengan indikator pencapaian; 1) Jumlah kegiatan pengembangan SDM; 2) Jumlah kegiatan Assesment Ls Pro, LSSM, Lembaga Uji, dan ISO 9001:2008; 3) Jumlah Promosi Litbang. Untuk memperoleh indikator pencapaian tersebut didukung oleh rencana aksi 1) Jumlah SDM yang memperoleh pendidikan, pelatihan, pembinaan, magang, dan penilaian untuk jabatan fungsional; 2) Tersertifikasinya Lembaga Sertifikasi Produk (Ls Pro) dan Lembaga Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 (TIQA); 3) Tersertifikasinya Lab. Pengujian dan Kalibrasi untuk ISO 17025; 4) Tersertifikasinya Layanan jasa pelatihan dan konsultasi untuk ISO 9001:2008; 5) Terlaksananya Pameran dan Promosi, Diseminasi Litbang, Seminar Tekstil, Penerbitan Majalah Arena Tekstil serta terlaksananya SPIP.

- Kegiatan 4 : Perencanaan, anggaran, dan Monev dengan indikator kinerja jumlah dokumen Perencanaan, anggaran, dan Monev yang disusun
- Kegiatan 5 : Layanan Perkantoran dengan indikator kinerja jumlah bulan layanan perkantoran yang diselenggarakan
- Kegiatan 6 : Pengadaan Kendaraan Roda Empat dengan indikator kinerja jumlah unit pengadaan kendaraan roda empat.
- Kegiatan 7 : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan indikator kinerja jumlah unit pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- Kegiatan 8 : Pengadaan Peralatan dan fasilitas Perkantoran dengan indikator kinerja jumlah unit pengadaan Peralatan dan fasilitas Perkantoran
- Kegiatan 9 : Rehabilitasi Gedung / Bangunan dengan indikator kinerja jumlah Gedung / Bangunan yang direhab

BAB IV

PENUTUP

Revisi Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) BBT 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada RENSTRA Kemenperin 2015-2019 dan Renstra Teknokratik BPPI 2015-2019. RENSTRA ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi BBT serta menjadi acuan dalam penyusunan program/kegiatan di BBT periode 2015-2019 dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan BBT. Renstra BBT 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai bagian dari Renstra BPKIMI dan Renstra Kemenperin. RENSTRA ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA BBT memerlukan prasyarat: (1) Konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan RENSTRA; (2) Koordinasi yang lebih intensif antara birokrat, akademisi dan industri; (3) Kolaborasi yang lebih sinergis antara BPKIMI dan BBT; (4) Membangun jejaring kerja antara peneliti di lembaga litbang lainnya dan di Perguruan Tinggi; (5) Ketersediaan sarana dan prasarana litbang; (6) Dukungan SDM litbang yang kompeten dan berintegritas.

2.	Meningkatnya pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan sesuai harapan pelanggan	1. Jumlah realisasi PNBP sebesar 100% dalam waktu 5 tahun (milyar rupiah)	3,82	4,78	5	5	5,2
		2. Jumlah sampel yang diuji (ribu)	2	2,3	2,6	2,9	3,3
		3. a. Jumlah SDM industri yang menjadi peserta pelatihan yang diadakan satker	150	173	200	-	-
		b. Jumlah kegiatan layanan jasa pelatihan teknis	-	-	-	10	15
		4. Jumlah alat yang dikalibrasi	1110	1350	1500	1750	2000
		5. Jumlah perusahaan yang disertifikasi	16	18	18	200	200
		6. Jumlah prototip alat yang dihasilkan	1	1	2	2	2
7. Jumlah perusahaan yang mendapatkan konsultasi	2	2	2	2	3		

layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, konsultasi, pelatihan teknis, RBPI, kerjasama litbang dan standarisasi, serta kerjasama inkubasi/teknologi proses	
III. Pengembangan Kelembagaan BBT	III. Pengembangan Kelembagaan BBT
1. Peningkatan kemampuan teknis SDM BBT	1. Jumlah SDM yg dilatih
2. Rintisan pendidikan gelar	2. Jumlah SDM yang mengikuti S2
3. Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional	3. Jumlah SDM fungsional yg dinilai
4. Ceramah / Sarasehan	4. Jumlah Ceramah / sarasehan
5. Outdoor Team Building	5. Jumlah SDM yg terlatih
6. Diseminasi hasil litbang	6. Jumlah peserta Diseminasi
7. Seminar Nasional Tekstil	7. Jumlah peserta seminar tekstil nasional
8. Bussiness Gathering	8. Jumlah peserta bussiness gathering
	9. Jumlah penerbitan majalah Arena Tekstil
	10. Sertifikasi

		8. Jumlah perusahaan yang diinkubasi	2	2	2	2	3
		9. Jumlah RSNI yang dihasilkan	2	2	3	3	4
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeksi kepuasan pelanggan	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6
		2. Persentase minimal ketepatan pelayanan sesuai SPM/SPK	90	90	90	90	90
		3. Jumlah permintaan yang dilayani	840	882	926	972	1020
		4. Persentase jumlah komplain yang diselesaikan	100	100	100	100	100

9. Penerbitan majalah Arena Tekstil	ISO 9001:2008
10. Implementasi ISO 9001:2008	11. Tersusunnya Dokumen Renstra
11. Penyusunan Renstra	12. Jumlah Promosi / pemasaran
12. Pemasaran dan kerjasama layanan jasa teknis	13. Sertifikasi LPK dan SMM
13. Reassessment /Surveillance LPK dan SMM	14. Lporan kegiatan SPIP
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	
IV. Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monev	IV. Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monev
1. Korrdinasi Perencanaan, Monev dan pelaporan	1. Jumlah dok Perencanaan, Monev dan pelaporan
2. Pengelolaan SAI dan BMN	2. Laporan Pengelolaan SAI dan BMN
V. Layanan Perkantoran	V. Layanan Perkantoran
1. Pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah bulan layanan

			4	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi perkantoran	<p>1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dalam tupoksi (jumlah pegawai)</p> <p>2. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam rangka tupoksi</p> <p>3. Tingkat maturitas SPIP</p>	30	40	50	60	70			<p>2. Operasional dan pemeliharaan perkantoran</p> <p>VI. Pengadaan Kendaraan Roda Empat</p> <p>VII. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</p> <p>VIII. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</p> <p>IX. Rehabilitasi Gedung / Bangunan</p>	<p>Jumlah unit kendaraan roda empat</p> <p>Jumlah unit perangkat pengolah data dan komunikasi</p> <p>Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran</p> <p>Jumlah luas gedung / bangunan yang direhabilitasi</p>
--	--	--	---	---	--	----	----	----	----	----	--	--	--	---

Tabel L.2.
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2015 – 2019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ESELON : BALAI BESAR TEKSTIL

(dalam ribuan rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	2015		2016		2017		2018		2019		PELAKSANA
			TARGET	ALOKASI									
A. Penelitian dan Pengembangan Teknologi tekstil													
1. Penelitian, kajian dan rekayasa	Jumlah hasil litbang meningkat dan berkualitas	Hasil litbang yang siap diaplikasikan	2	1.023.300.	2	1.266.300.	3	1.547.700.	3	1.872.800.	3	2.060.000	Bidang SRS dan Peneliti/likay asa/perekay asa
		Hasil litbang yang telah diaplikasikan	1		1		1		2		2		
		Jumlah kerjasama litbang	2		2		3		3		3		
2. Layanan Jasa Teknis	Meningkatnya penerimaan JPT	Nilai JPT (Rp)	8	2.780.805.	8	3.476.000.	9	4.171.000.	9	4.866.400.	9	5.561.000.	Bidang SRS, Bidang Paskal, Bidang PKAT
3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Tekstil													
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan Teknis SDM BBT ▪ Rintisan Pendidikan Gelar ▪ Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional ▪ Ceramah / sarasehan ▪ Outdoor Team 	Meningkatnya kompetensi personal pegawai	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan magang	22 orang	821.800	22 orang	850.000	22 orang	870.000.	22 orang	900.000	22 orang	920.000.	Bagian TU
Jumlah pegawai yang mendapatkan sertifikat		2 orang	3 orang		3 orang		3 orang		3 orang				

Building		keahlian												
▪ Diseminasi Hasil Litbang	Terlaksananya sosialisasi hasil litbang tekstil	Jumlah peserta	200	146.500.	220	160.000.	250	180.000.	280	200.000	300	250.000.	Bidang PJT, SRS	
▪ Seminar tekstil nasional														
▪ Pemasaran dan kerjasama	Permintaan yang dilayani	Jumlah permintaan	600	124.000	650	150.000	700	200.000	750	250.000	800	300.000	Bidang PJT	
	Meningkatnya tingkat kepuasan pelanggan	Persentase minimal kepuasan pelanggan	80		80		80		80					
	Terlaksananya jasa layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) [Persentase]	Persentase minimal ketepatan pelayanan sesuai SPM/SPK	90		90		90		90					
▪ Penerbitan Majalah/Jurnal Ilmiah	- Tersedianya majalah ilmiah BBT - Tercapainya Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada jurnal ilmiah nasional dan internasional	Frekuensi terbit tiap tahun	2 Volume	93.300	2 Volume	100.000	2 Volume	110.000	2 Volume	130.000	2 Volume	150.000	Bidang SRS / Peneliti	
		Jumlah tulisan	12		12		14		16		16			
▪ Reassessment surveillance LSSM, LS Pro dan Lembaga uji	Terlaksananya implementasi Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025 dan SMM ISO 9001:2008	Kegiatan Sertifikasi ISO 17025 dan ISO 9001:2008	2	130.000	2	150.000.	2	175.000	2	200.000	2	260.000	Bidang PKAT, Bidang Paskal	
▪ Penerapan SMM ISO 9001:2008														
▪ Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah laporan	1	36.500	1	40.000	1	45.000	1	50.000	1	55.000	Bagian TU	
4. Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monev	Terlaksananya kegiatan Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monev	Jumlah dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monev	4	330.500	4	363.500	4	399.800	4	439.800	4	483.800	Bagian TU	

5. Layanan Perkantoran	Terselenggaranya layanan perkantoran BBT	Jumlah bulan layanan	12	19.087.70 0	12	20.989.80 0	12	23.088.80 0	12	25.397.70 0	12	27.937.40 0	Bagian TU
6. Pengadaan Kendaraan Roda Empat	Tersediannya kendaraan roda empat dalam rangka pelaksanaan tupoksi	Jumlah unit kendaraan roda empat	-	-	2	541.200	-	-	2	720.200	-	-	Bagian TU
7. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Tersediannya perangkat pengolah data dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan tupoksi	Jumlah unit perangkat pengolah data dan komunikasi	18	125.500	18	138.000	18	182.200	18	200.400	18	220.500	Bagian TU
8. Peralatan dan fasilitas perkantoran	Tersediannya peralatan dan fasilitas perkantoran dalam rangka pelaksanaan tupoksi	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	5	2.200.200	5	2.420.000	5	2.662.000	5	2.928.200	5	3.221.000	Bagian TU
9. Rehabilitasi gedung / bangunan	Tersediannya gedung / bangunan dalam rangka pelaksanaan tupoksi	Jumlah gedung / bangunan yang direhab	-	-	1	2.420.000	-	-	1	2.928.200	-	-	Bagian TU

Tabel L.3.
Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra Balai Besar Tekstil TA 2015-2017

(dalam ribuan rupiah)

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2015			2016			2017			2018	2019
	Target (RP)	Realisasi (RP)	%	Target (RP)	Realisasi (RP)	%	Target (RP)	Realisasi (RP)	%		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEKSTIL											
Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri											
- Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan di industri	8,000	7,000	88	394,222	381,316	97	376,470	329,542	88	512,775	800,000
- Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan di industri	18,780	16,951	90	63,260	61,937	98	94,460	82,755	88	275,766	300,000
- Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah	74,010	73,665	100	71,040	68,840	97	48,580	46,020	95	48,580	50,000
- Jumlah kerjasama litbang	163,597	157,723	96	23,775	21,650	91	227,740	192,038	84	109,120	200,000
Meningkatnya pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan sesuai harapan pelanggan											
- Jumlah realisasi PNBP sebesar 100%	4,968,971	5,479,450	110	4,775,000	4,850,246	102	5,000,000	4,476,240	90	5,000,000	5,200,000
- Jumlah sampel yang diuji (ribu)	2,777,000	3,553,477	128	2,992,000	3,126,610	104	3,000,400	2,801,841	93	2,869,000	2,969,000
- Jumlah SDM industri yang menjadi peserta pelatihan yang diadakan satker	100,000	115,386	115	135,000	104,950	78	135,000	131,950	98	150,000	200,000
- Jumlah alat yang dikalibrasi	350,000	631,568	180	600,000	626,020	104	500,000	577,144	115	450,000	450,000
- Jumlah perusahaan yang disertifikasi	500,000	1,074,113	215	880,400	877,250	100	1,105,400	786,425	71	1,075,000	1,100,000

-	<i>Jumlah prototip yang dihasilkan</i>	-	-	-	15,100	12,431	82	2,200	2,200	100	50,000	50,000
-	<i>Jumlah perusahaan yang mendapat konsultasi</i>	25,000	20,000	80	20,000	16,380	82	210,000	159,825	76	300,000	325,000
-	<i>Jumlah perusahaan yang diinkubasi</i>	58,000	84,905	146	132,000	80,500	61	47,000	12,000	26	100,000	100,000
-	<i>Jumlah RSNI yang dihasilkan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik												
-	<i>Indeks kepuasan pelanggan</i>	127,398	126,667	99	34,908	34,305	99	119,200,	108,937	91	80,413	100,000
-	<i>Persentase minimal ketepatan pelayanan sesuai SPM/ SPK</i>	552,320	540,650	98	68,904	68,277	96	100,650	94,932	94	94,960	100,000
-	<i>Jumlah permintaan yang dilayani</i>	2,683,737	2,635,974	98	2,778,602	2,678,171	96	1,289,056	1,208,054	94	1,845,906	2,000,000
-	<i>Persentase jumlah komplain yang diselesaikan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi perkantoran												
Meningkatnya dukungan												
-	<i>Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan pelatihan dalam tupoksi (jumlah pegawai)</i>	894,720	850,646	95	230,575	225,824	98	182,750,	174,018	95	157,160	180,000
-	<i>Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam rangka tupoksi</i>	227,873	214,068	94	182,862	177,617	97	571,094	546,331	96	676,574	800,000

Tabel L.3.
TARGET PENERIMAAN JPT BBT 2015 – 2019

(Rupiah)

NO	JENIS JPT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Layanan Pengujian Tekstil dan Lingkungan	2.600.000.000	3.250.000.000	3.900.000.000	4.550.000.000	5.200.000.000
2	Layanan Kalibrasi	350.000.000	437.500.000	525.000.000	612.500.000	700.000.000
3	Kerjasama Litbang dan Standardisasi	70.000.000	87.500.000	105.000.000	122.500.000	140.000.000
4	Layanan Sertifikasi SMM, SML dan LS Pro	250.000.000	312.500.000	375.000.000	437.500.000	500.000.000
5	Kerjasama Inkubasi/Teknologi Proses	175.000.000	218.750.000	262.500.000	306.250.000	350.000.000
6	Layanan Konsultansi	125.000.000	156.250.000	187.500.000	218.750.000	250.000.000
7	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	225.000.000	281.250.000	337.500.000	393.750.000	450.000.000
8	Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perencanaan Industri	25.000.000	31.250.000	37.500.000	43.750.000	50.000.000
	Jumlah	3.820.000.000	4.775.000.000	5.730.000.000	6.685.000.000	7.640.000.000

Gambar L.1. PETA STRATEGI BALAI BESAR TEKSTIL



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL

NOMOR : 13 /BPPI/BBT/Kep/01/2018

TENTANG

REVISI KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BALAI BESAR TEKSTIL TAHUN 2015-2019

KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Balai Besar Tekstil adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Tekstil tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP;

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9/M.PAN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/06/2015 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2006, tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil Bandung;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Perindustrian;
11. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Nomor 353/BPPI/09/2017 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Tekstil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Mencabut Keputusan Kepala Balai Besar Tekstil Nomor 31/Kep/BPPI/BBT/01/2017 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Tekstil Tahun 2015-2019.
- Kedua** : Menetapkan Revisi Kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Tekstil Tahun 2015-2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Tekstil.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tahun 2019 dengan ketentuan akan diadakan perubahan-perubahan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Plt. KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL,



Tembusan:
1. Pertinggal
IYP/PCB./SK IKU 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Balai Besar Tekstil
 Tahun : 2015-2019

Visi : Menjadi lembaga riset dan pelayanan jasa teknis yang unggul dan terpercaya di bidang tekstil

Misi : 1. Melakukan penguatan kompetensi melalui inovasi teknologi
 2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional
 3. Meningkatkan jejaring dengan lembaga lain

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
				Perspektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S)				
1	Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri	Hasil litbang yang siap diterapkan	Jumlah Penelitian	3	3	4	5	5
		Hasil litbang yang telah diimplementasikan	Jumlah Penelitian	1	1	2	3	4
		Hasil litbang yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (<i>problem solving</i>)	Jumlah Penelitian/ Paket teknologi	1	1	2	2	3
		Kerja sama litbang instansi dengan industry/instansi/lembaga terkait	Jumlah kerjasama	3	3	4	5	5
		Jumlah karya tulis ilmiah (KTI) yang diterbitkan di jurnal ilmiah	Jumlah karya tulis ilmiah (KTI)	12	12	12	14	14
		Jumlah prosiding yang diterbitkan	Jumlah prosiding	-	-	-	1	1
		Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)						
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan pelanggan	indeks	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6
3	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi perkantoran	Tingkat maturitas SPIP	indeks	-	-	-	3.2	3.2

Plt. Kepala Balai Besar Tekstil,

